Masa Jabatan Kades Jadi 8 Tahun

KEBUMEN (KR) - Perpanjangan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 8 tahun dinikmati 435 kepala desa (kades) dari 449 desa di Kabupaten Kebumen. SK perpanjangan masa jabatan kades diserahkan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto di Gedung Setda Kebumen, Selasa (21/5). Perpanjangan masa jabatan kades ditegaskan sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diteken Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada 25 April 2024.

Menurut bupati, ada 14 kades di Kabupaten Kebumen yang tidak menerima SK perpanjangan masa jabatan karena statusnya sebagai penjabat (Pj). Bupati berharap, perpanjangan masa jabatan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta selalu meningkatkan pelayanan.

"Perpanjangan masa jabatan membuat kades memiliki banyak waktu untuk menuntaskan program-program sesuai visi dan misinya," jelas Arif yang mengingatkan kades untuk menjalankan tugas sebaik-baiknya dengan selalu mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.

Penyerahan SK perpanjangan masa jabatan kades diisi pembekalan oleh Kapolres, Kajari, dan Dandim Kebumen. Kades diingatkan untuk menjaga integritas dan menjalankan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Perpanjangan masa jabatan disambut gembira para kades. Apalagi menurut Kades anjungrejo, Kecamatan Buluspesantren, yang juga Ketua Paguyuban Reksa Praja Kebumen, Shobirin, perpanjangan masa jabatan sudah ditunggu semua kades. "Perpanjangan masa jabatan meningkatkan semangat kades dalam menjalankan tugas," tandasnya. **(Suk)-f**

Enam Tahun Berturut-turut Pemkab Klaten Raih Opini WTP

KR-Dokumen Pemkab Klaten.

Bupati dan Ketua DPRD Klaten menerima penghargaan opini WTP.

KLATEN (KR) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk tahun anggaran 2023.Dengan demikian Pemkab Klaten sudah mencapai WTP selama enam tahun berturut-turut sejak 2018. Bupati Klaten, Sri Mulyani, menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Klaten tahun anggaran 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jateng di Kantor BPK Jateng, Rabu (21/5).

Atas laporan keuangan tersebut, BPK Perwakilan Jawa Tengah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atau unqualified opinion. Hal itu menunjukkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Klaten tahun 2023 telah disajikan dengan jujur, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Usai acara, Sri Mulyani mengungkapkan rasa syukur atas perolehan opini WTP tahun anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Klaten tersebut. Bupati menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemkab Klaten atas kerja keras mereka, yang memungkinkan pengelolaan anggaran dan kinerja Pemkab Klaten akuntabel dan transparan.

"Pencapaian Opini WTP ini dicapai berkat semangat seluruh ASN baik itu di jajaran Eksekutif maupun di jajaran Legislatif di Kabupaten Klaten. Saya berharap capaian WTP ini dapat semakin memotivasi untuk meningkatkan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Klaten serta mempertahankan kinerja Pemerintah Kabupaten Klaten yang akuntabel dan transparan," kata Sri Mulyani.

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jateng, Hari Wiwoho, berharap penghargaan WTP ini dapat memotivasi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus berinovasi dan berprestasi di berbagai bidang. Hari menjelaskan bahwa penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan pemerintah daerah untuk 16 kabupaten/kota di Jawa Tengah adalah bagian dari mandat undang-undang.

Berdasarkan pemeriksaan BPK pada 16 kabupaten/kota, ditemukan beberapa isu penting yang memerlukan perhatian, termasuk pengelolaan pendapatan pajak daerah yang belum optimal, kekurangan volume pekerjaan atau ketidaksesuaian dalam aspek pekerjaan, pemanfaatan aset yang tidak sesuai ketentuan, serta pembayaran jasa konsultasi yang tidak sesuai dengan kondisi eksternal. **(Sit)-f**

Aisyiyah Berjihad Wujudkan Keluarga Sakinah

KEBUMEN (KR) - Puluhan ribu anggota Aisyiyah seeks Karesidenan Kedu mengikuti Wisata Dakwah Aisyiyah di Alun-alun Pancasila Kebumen, Minggu (19/5). Dalam kesempatan ini, Ketua Pimpinan Wilayah Aisyiyah (PWA) Jawa Tengah, Eny Winaryati, mengajak seluruh anggota Aisyiyah berjihad mewujudkan keluarga sakinah. "Dalam keluarga sakinah akan terwujud anak-anak yang saleh dan salihah, anak-anak yang akan meneruskan tongkat estafet dakwah dan mengisi Indonesia sehingga menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur," tegasnya. Dikatakan, tujuan Aisyiyah adalah mewujudkan masyarakat Islam sebenar-benarnya yang dimulai dari keluarga. "Keluarga sakinah adalah dambaan semua orang, maka di era globalisasi, kita harus memperkuat ketahanan keluarga," ujarnya.

Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, KH Tafsir, dalam tausiyahnya menyampaikan bahwa prinsip dakwah Muhammadiyah adalah mudah dan menggembirakan. Tafsir juga mengatakan, wisata dakwah tidak lain untuk membangun tali silaturahmi dan wujud dakwah Muhammadiyah yang mudah dan menggembirakan. Wisata Dakwah Aisyiyah sekaligus memperingati 107 tahun Aisyiyah, juga dihadiri Bupati Kebumen Arif Sugiyanto. Dukungan pada dakwah Muhammadiyah dan Aisyiyah diberikan dengan rencana memberi hibah Rp 800 juta untuk Aisyiyah, dan Rp 1 miliar untuk Muhammadiyah Kebumen. **(Suk)-f**

Tekan Perokok Anak Harus Jadi Agenda Bersama

MAGELANG (KR) - Sebagai bagian gerakan *tobacco center*, Muhammadiyah Tobacco Control Center (MTCC) Universitas Muhammadiyah Magelang (Unimma) menyatakan dukungan penuh mewujudkan tema "World No Tobacco Day" atau "Hari Tanpa Tembakau Sedunia (HTTS)" tahun 2024 ini, yaitu *Protecting Children from Tobacco Industry Interference*' atau melindungi anak-anak dari campur tangan industri tembakau.

Demikian dikemukakan Ketua MTCC Unimma Dr Retno Rusdjijati MKes kepada KR di sela-sela kegiatan di Lapangan Sawitan Magelang, Jumat (24/5). Dikatakan, Tema HTTS tahun ini sangat tepat untuk mengingatkan agar kita dapat mengambil peran yang lebih besar guna melindungi generasi muda dari sifat fatalistik penggunaan dan paparan asap rokok.

Kondisi kesehatan yang buruk di usia dini akan menyebabkan kesehatan yang buruk pula di saat dewasa. Lebih dari 43 juta anak Indonesia hidup serumah dengan perokok dan terpapar asap rokok atau sebagai perokok pasif. Jumlah perokok anak usia 10-18 tahun terus meningkat dari 7,2 persen pada 2013 menjadi 9,1 persen pada 2018. Data The Global Youth Tobacco Survey pada tahun 2006 menyebutkan 6 dari 10 pelajar di Indonesia terpapar asap rokok selama mereka di rumah.

Sebesar 37,3 persen pelajar dilaporkan biasa merokok, dan 3 diantara 10 pelajar pertama kali merokok pada usia dibawah 10 tahun. Hal ini dikarenakan, anak-anak dan kaum muda dijejali iklan, promosi dan sponsor rokok yang sangat gencar. Tanpa upaya sistematis dan masif, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan prevalensi perokok anak akan menjadi 16 persen pada tahun 2030 atau setara 6 juta anak. Oleh karenanya, lanjutnya, MTCC Unimma berkomitmen penuh untuk menggugah kepedulian semua komponen masyarakat untuk menyelamatkan generasi penerus Indonesia.

HTTS, yang jatuh pada

KR-Thoha

Kegiatan lomba poster.

tanggal 31 Mei 2024 ini, diperingati MTCC Unimma dengan beberapa kegiatan, yaitu Temu Petani dan Gerakan Bersih Pungut Puntung Rokok serta penempelan Stiker "Stop Merokok" di area wisata Kedung Kayang Sawangan Magelang pada 23 Mei 2024 lalu.

Kemudian lomba poster, yang diikuti 50 anak-anak keluarga petani tembakau di Kecamatan Borobudur, Sawangan dan Kajoran yang berusia 12-14 tahun (anak-anak usia SMP), yang dilaksanakan di Lapangan drh Soepardi Sawitan Magelang, Jumat (24/5). Kegiatan ini juga mengundang OPD-OPD terkait yaitu Bappeda, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang. Rektor Unimma Dr Lilik Andriyani MSi juga hadir dalam kegiatan ini.

MTCC Unimma menyatakan bahwa upaya menekan jumlah perokok anak (generasi muda) harus menjadi agenda bersama. HTTS tahun 2024 ini merupakan kesempatan untuk meningkatkan kesadaran tentang efek bahaya konsumsi rokok dan paparan asap rokok, serta mencegah penggunaan rokok dalam bentuk apapun (cq e-cigarette, vape).

Selanjutnya MTCC Unimma menegaskan bahwa gerakan komunitas anak muda yang mempunyai ide dan kreativitas dalam menyampaikan aspirasi berperan penting untuk membantu menurunkan prevalensi perokok pada remaja anak.

Kondisi ini juga menjadi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) di tahun 2024. Serta daya ungkit bagi daerah dalam membantu implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR), termasuk pengaturan pelarangan iklan, promosi dan sponsor rokok, maupun bahaya pada rokok.

MTCC Unimma memandang gerakan milenial harus terus didukung dan disadarkan. Edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat, cq kaum milenial ini, bisa menekan Pemerintah Indonesia agar bersikap tegas pada industri rokok. Fakta menunjukkan bahwa industri rokok leluasa merayu generasi muda melalui iklan dan sponsor. Penurunan angka prevalensi rokok anak saat ini hanya bisa diatasi jika akses anak-anak terhadap rokok dijauhkan. Fakta ironis di Indonesia, generasi muda negara ini terpapar iklan rokok di toko, papan iklan, dan internet, serta melalui sponsor untuk konser musik, liga olahraga, dan acara lainnya. **(Tha)-f**

PEMPROV JATENG DAN 35 PEMDA/PEMKAB

Raih Opini Kualitas Tinggi Pelayanan Publik

SEMARANG (KR) - Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng Sumarno mengatakan, Pemprov Jateng dan 35 pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah sukses meraih opini kualitas tinggi pelayanan publik pada 2023 dari Ombudsman RI. Penilaian dari Ombudsman di tahun 2022 adalah 97,14 persen sudah masuk katagori zona hijau. Sedangkan untuk 2023 sudah hijau semua.

Demikian dikatakan Sekda Jateng Sumarno kepada wartawan di Semarang, Jumat (24/5). Menurut Sumarno, pada tahun 2023 semua pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah mencapai tingkat kepatuhan 100 persen dan masuk zona hijau. Aktivitas pegawai dalam memberikan pelayanan publik baik langsung maupun tidak langsung dilakukan secara cepat, mudah, dan berkualitas.

Untuk bisa melakukan tugas tersebut, pegawai pemerintah di Jawa Tengah ini harus memiliki kapasitas yang baik, karena setiap sikap yang mereka lakukan akan perpengaruh terhadap penilaian masyarakat. Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng mengatakan, Jawa Tengah selalu langganan hijau dalam pelayanan publik, baik di provinsi maupun kabupaten/kotanya.

Karena itu, Jawa Tengah harus tidak lagi puas dengan hasil hijau yang diberikan oleh Ombusdman, tetapi harus menuju level selanjutnya, yaitu level yang terkait dengan dampak bagi pencapaian kinerja makro pembangunan. Menurut Robert, capaian kinerja makro pembangunan harus menjadi fokus utama Pemprov

KR-Budiono

Sekda Jateng Sumarno dan para pejabat daerah usai menerima opini kualitas tinggi dari Ombudsmen RI.

Jawa Tengah. Salah satunya adalah penurunan angka kemiskinan ekstrem. Caranya melalui perbaikan-perbaikan di sejumlah titik strategis pelayanan publik di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, lapangan pekerjaan, dan sector lain yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. **(Bdi)-f**

PSHT Harus Jadi Duta Pendingin Masyarakat

SEMARANG (KR) - Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) menggelar Rakorcab PSHT Tingkat Jawa Tengah, Kamis (23/5) di hotel New Puri Garden, Semarang. Rakorcab dengan tema Sinergitas PSHT dengan Polri untuk menciptakan situasi yang kondusif dihadiri Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi.

Ketua Perwapus Jateng, AKBP (Purn) Sapto Yuhanis, menyampaikan rasa bangga atas kehadiran pucuk pimpinan jajaran Polda Jateng. ìKami sangat terhormat atas kehadiran bapak Kapolda, acara pagi ini kami melaksanakan Rakorcab tingkat Jateng," tutur Sapto Yohanis. Ia menyebutkan pada bulan Suro akan punya hajat besar yaitu pengesahan calon warga PSHT.

KR-Karyono

Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi di tengah peserta Rakorcab PSHT Tingkat Jateng.

"Kami laporkan bahwa pada bulan Suro besok Jawa Tengah akan mengesahkan sekitar 14 ribu warga baru," ungkapnya.

Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi menyampaikan PSHT mempunyai energi lebih yang harus di salurkan kepada hal yang baik yaitu budi luhur.

"PSHT mempunyai energi berlebih, energi ini harus kita salurkan seperti maklumat yang dibacakan tadi di situ ada budi luhur," katanya. Menurut Kapolda iwa korsa yang dimiliki harus kita maknai kebersamaan saling menjaga, saling memiliki itulah PSHT, jangan dilepaskan dari kebanggaan yang berlebihan sehingga justru melanggar hukum.

"Saya minta yang hadir untuk membawa pesan terkait Pemilu, di situ ada nilai persatuan dan kesatuan siapapun pilihannya adalah putra terbaik dalam rangka mengemban amanat undang-undang," tuturnya. Kapolda menyebutkan saat gelaran Pemilu kita mempunyai Satgas Manajemen media, Satgas manajemen Sosial, Satgas manajemen kemitraan sebagai corong dari POLRI untuk mendinginkan masyarakat yang panas. **(Cry)-f**

Kejutan Pendaftaran Balon Bupati Pati

PATI (KR) - Meski Pilkada Pati baru masuk tahapan parpol melakukan penjaringan bakal calon (balon), namun sudah mulai terjadi kejutan. Salah satunya adalah pisahnya mantan Wakil Bupati H Saiful Arifin SE dengan mantan Sekda H Ir Suharyono MM.

Saiful Arifin mendaftar ke DPC PDIP Pati sebagai calon bupati. Sedang Suharyono mendaftar sebagai calon wakil bupatinya Wahyu Indriyanto (kades Gadingrejo Juwana). Padahal, dalam dekade lima tahun silam, dua figur tersebut, yakni Saiful Arifin dan Suharyono berada dibawah komando mantan Bupati Pati H Haryanto SH MM MSi (yang sekarang terpilih menjadi anggota DPR RI FPDIP).

"Lalu, posisi pak Haryanto mendukung siapa ya. Ini sangat membingungkan ?" dDemikian pertanyaan dari banyak kalangan yang ditemui wartawan, Kamis (23/5). Menurutnya, ini politik kelas tinggi dan membingungkan. Ketua desk pilkada DPC PDIP Pati, Teguh Bandang Waluyo mengatakan, sejak dibuka penjaringan tanggal 1 hingga 20 Mei, tercatat ada 5 balon bupati dan 1 balon Wakil bupati yang melamar ke partainya.

Kepada wartawan, dirincikan mengenai figur yang melamar sebagai calon bupati. Yaitu Slamet Warsito (pengusaha), Novi Eko Yulianto (Kades Jakenan), Agus Sunarko (Camat Dukuhseti), Saiful Arifin (Mantan Wabup), dan Wahyu Indriyanto (Kades Gadingrejo). Sedangkan yang mendaftar sebagai balon wakil bupati adalah Suharyono, mantan sekda Pati.

"Berkas administrasi akan diserahkan ke DPP PDIP. Tugas kami hanya menjaring bakal calon. Kewenangan sepenuhnya ada di Jakarta" ucap Teguh Bandang Waluyo, yang dikenal juga menjabat sebagai bendahara DPC PDIP Pati. Tanda-tanda pilkada Pati 2024 akan diwarnai kegembiraan, mulai tercermin menguatnya suara tolak pilkada calon tunggal. Hal tersebut ditandai banyaknya figur yang mendaftar sebagai balon bupati ke sejumlah parpol.

KR-Alwi Alaydrus :

Suharyono dan Saiful Arifin.

PDIP adalah parpol yang paling banyak didatangi para balon. Karena pada pileg Febuari 2024 lalu, mampu mendulang 14 kursi DPRD Pati. Sehingga pada pilkada Nofember mendatang, dipastikan bisa mengusung balon sendiri, misal saja, tidak ada parpol lain yang berkoalisi. Kantor parpol lain di Pati, juga terlihat sibuk menerima kedatangan balon bupati. Seperti PPP dengan 6 kursi, PKB 6, Gerindera 6, PKS 5, PD 5, Golkar 5 dan Nasdem 3. **(Cuk)-f**